

Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik yang Lebih Aktif

Digital Transformation and Community Participation: Realizing More Active Public Engagement

Jumalia Mannayong¹, Muh. Rizal S², Herling³, Muhammad Faisal⁴

Politeknik STIA LAN Makassar^{1,3,4}, Universitas Negeri Makassar^{2,3}, Institut Pemerintahan

Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan⁴

Email: jumaliamuchtar@stialanmakassar.ac.id

Naskah diterima tanggal 18 April 2024. Naskah direvisi tanggal 10 Juni 2024.

Naskah disetujui tanggal 11 Juni 2024.

Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi hubungan dinamis antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik. Dengan semakin terintegrasinya teknologi digital di berbagai sektor, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk memahami bagaimana kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana inisiatif transformasi digital dapat menghasilkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan praktik partisipatif di Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif melalui studi kasus dari berbagai organisasi publik dan survei yang mengukur pemanfaatan alat digital dan tingkat keterlibatan masyarakat. Temuan penelitian ini menyoroti peran penting platform digital, seperti media sosial, forum online, dan aplikasi seluler, dalam mendorong interaksi langsung antara badan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi digital yang efektif tidak hanya memperluas jangkauan inisiatif publik namun juga memberdayakan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya, menyumbangkan ide, dan berkolaborasi secara lebih aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi transformasi digital untuk membentuk kembali lanskap keterlibatan publik, yang pada akhirnya mendorong masyarakat demokratis yang lebih partisipatif dan inklusif.

Kata Kunci: Digital; Organisasi Publik; Partisipasi Masyarakat; Pemerintah; Transformasional Digital;

Abstract

This article explores the dynamic relationship between digital transformation and community participation in the context of public engagement. With the increasing integration of digital technologies across various sectors, there is a growing need to understand how these technological advancements can enhance citizen involvement. The primary objective of this research is to investigate how digital transformation initiatives can lead to more active public engagement and participatory practices. The study employs a

mixed-methods approach, combining qualitative analysis from case studies of various public organizations and surveys that measure the utilization of digital tools and the level of community engagement. The research findings highlight the significant role of digital platforms such as social media, online forums, and mobile applications in fostering direct interactions between governmental institutions and citizens. Moreover, the study reveals that effective digital transformation not only expands the reach of public initiatives but also empowers citizens to voice their opinions, contribute ideas, and actively collaborate in policy-making processes. This research contributes to a deeper understanding of the potential of digital transformation to reshape the landscape of public engagement, ultimately promoting a more participatory and inclusive democratic society.

Keywords: Digital; Public Organisation; Public Participation; Government; Digital Transformational.

PENDAHULUAN

Di tengah era modern yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital, transformasi digital telah menjelma menjadi sorotan utama di beragam sektor, tak terkecuali dalam wilayah organisasi publik ([AlNuaimi et al., 2022](#); [Gaglio et al., 2022](#); [Mergel et al., 2019](#); [Putra, 2022](#)). Peran sentral organisasi publik dalam menyediakan layanan-layanan masyarakat, mengembangkan kebijakan-kebijakan yang relevan, serta memfasilitasi interaksi antara lembaga pemerintah dan masyarakat yang tidak dapat disepelekan ([He et al., 2022](#); [Limani et al., 2018](#)). Di tengah dinamika ini, muncul suatu tantangan yang perlu dipecahkan, yaitu mengenai dampak dari transformasi digital terhadap partisipasi warga dalam kerangka keterlibatan publik. Sementara penggunaan teknologi digital terus berkembang pesat, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memahami sejauh mana perubahan ini dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai proses partisipatif ([Alcaide Muñoz et al., 2017](#); [Emina, 2020](#); [Lindquist & Huse, 2017](#); [Mai et al., 2023](#)).

Transformasi digital bukan semata-mata perihal implementasi teknologi baru, melainkan juga tentang mengubah cara kerja, berpikir, dan berinteraksi dalam lingkungan publik ([Kernaghan, 2014](#); [Young, 2020](#)). Keberadaan teknologi telah meresap secara mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, dan organisasi publik memiliki peluang besar untuk memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas layanan dan interaksi dengan masyarakat. Namun, dalam kerangka ini juga timbul pertanyaan yang perlu dijawab: apakah transformasi digital hanya akan membentuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih efisien, ataukah juga dapat memicu partisipasi yang lebih aktif dan inklusif dari masyarakat luas? Perubahan paradigma ini memiliki potensi untuk mengubah cara

masyarakat berinteraksi dengan pemerintah, dari sekadar penerima layanan menjadi mitra dalam proses pembuatan keputusan. Partisipasi yang lebih aktif dapat terjadi melalui platform digital yang memungkinkan warga untuk memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan secara online.

Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa transformasi digital tidak hanya tentang teknologi itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana teknologi digunakan untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif, termasuk dengan mengadopsi praktik-praktik terbuka (*open government*) yang melibatkan transparansi informasi dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat serta kemampuan untuk meresponsnya melalui solusi digital yang relevan. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan harapan masyarakat menjadi pondasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi. Ini melibatkan dialog terus-menerus dengan warga, baik melalui forum *online*, survei, atau pertemuan tatap muka. Pemerintah perlu mampu merespons perubahan dan masukan yang muncul dari masyarakat, dan ini memerlukan fleksibilitas dalam mengadaptasi kebijakan dan praktik mereka. Selain itu, pemerintah juga harus fokus pada pendidikan dan literasi digital masyarakat.

Dengan memastikan bahwa warga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem digital, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan partisipasi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam upaya pemerintah yang terbuka, inklusif, dan responsif, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan berdampak positif dalam proses transformasi digital ([Busulwa et al., 2022](#); [Cohen et al., 2022](#); [Dörner & Rundel, 2021](#); [Goldsack & Zanetti, 2021](#); [Jiang et al., 2022](#); [Lattouf, 2022](#); [Prihanto & Kurniasari, 2019](#)). Ini bukan hanya tentang mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan warga, tetapi juga tentang mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pemerintah dan, pada akhirnya, bagaimana kebijakan dan layanan publik diperbaiki.

Sebagai akibatnya, perlu adanya penelitian yang teliti dan mendalam untuk menggali dampak transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat ([Anthopoulos et al., 2021](#); [Jeannot, 2018](#); [Krøtel, 2021](#); [Wirtz et al., 2020](#)). Langkah ini penting dalam merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam merangsang

partisipasi warga dalam berbagai proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Dengan mendasari investigasi ini pada pemahaman yang mendalam tentang bagaimana transformasi digital berdampak pada partisipasi masyarakat, kita dapat membangun kerangka kerja yang kokoh dalam mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan inklusif dalam era transformasi digital ini ([Busulwa et al., 2022](#); [Cohen et al., 2022](#); [Ebenso et al., 2021](#); [Elia et al., 2020](#); Gan et al., 2015; Goldsack & Zanetti, 2021; Lattouf, 2022; Prihanto & Kurniasari, 2019).

Dalam kaitannya dengan permasalahan ini, teori yang relevan adalah teori partisipasi masyarakat dan dampak teknologi digital ([Favero et al., 2016](#); [Jewell & Bero, 2007](#); [Lim & Yigitcanlar, 2022](#)). Teori partisipasi masyarakat membahas tentang pentingnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program publik. Sementara itu, teori dampak teknologi digital berkaitan dengan bagaimana teknologi digital memengaruhi dinamika sosial, komunikasi, dan partisipasi. Gabungan dari kedua teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi digital berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam konteks organisasi publik.

Sejumlah penelitian telah mengamati dampak transformasi digital pada organisasi publik, tetapi masih sedikit yang secara khusus fokus pada hubungannya dengan partisipasi masyarakat ([Arbabi et al., 2022](#); [Denhardt & Denhardt, 2000](#); [Gascó-Hernández et al., 2018](#); [Osman et al., 2022](#)). Penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada aspek efisiensi operasional dan pemanfaatan teknologi, sedangkan peran teknologi digital dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat masih perlu dijelajahi lebih lanjut ([Jun & Bryer, 2017](#); [Lorsuwannarat, 2017](#); [Ohri-Vachaspati et al., 2021](#); [Schäfer & Debus, 2018](#)). Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana transformasi digital dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam konteks organisasi publik.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi bagaimana inisiatif transformasi digital dalam organisasi publik dapat mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan praktik partisipatif. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana inisiatif transformasi digital dalam organisasi publik dapat mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan praktik partisipatif? Sedangkan manfaat penelitiannya adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang terkait untuk menambah wawasan dan

pemahaman baru serta memperkaya literatur ilmiah yang sudah ada. selain itu, dapat diaplikasikan secara langsung dalam praktik.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks penelitian ini terdapat beberapa teori yang relevan untuk memahami hubungan antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik. Teori-teori ini memberikan kerangka pemahaman yang penting dalam menggali dampak dan implikasi dari transformasi digital terhadap partisipasi warga dalam proses-proses partisipatif.

Pertama, teori partisipasi masyarakat menawarkan pandangan bahwa partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dapat memperkaya kualitas demokrasi dan merangsang perkembangan masyarakat yang lebih inklusif. Menurut teori ini, keterlibatan masyarakat merupakan kunci penting dalam memastikan kebijakan dan layanan-layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan ([Amirkhanyan et al., 2019](#); [Marx & Nguyen, 2018](#); [Morrissey, 2000](#)). Di sisi lain, teori dampak teknologi digital menjelaskan bagaimana teknologi dapat mempengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan partisipasi. Teori ini menguraikan bahwa teknologi digital dapat mempercepat dan mempermudah akses warga terhadap informasi serta meningkatkan jangkauan interaksi mereka dengan lembaga publik ([Mergel et al., 2019](#); [Zakharova, 2022](#)). Teknologi digital juga memiliki potensi untuk merentangkan batas-batas tradisional antara pemerintah dan masyarakat, memungkinkan partisipasi warga yang lebih langsung dan terdistribusi ([Mecca et al., 2021](#)).

Teori transformasi digital, seperti yang diusulkan oleh Tassabehji et al., ([Tassabehji et al., 2016](#)), memberikan wawasan penting mengenai bagaimana teknologi digital dapat merubah paradigma tradisional dalam organisasi, khususnya dalam sektor publik. Transformasi digital tidak sekadar berfokus pada penerapan teknologi semata, melainkan juga mengajukan ide bahwa perubahan ini melibatkan proses yang lebih komprehensif, yang mencakup aspek budaya, struktural, dan filosofis organisasi. Dalam konteks penelitian ini, teori transformasi digital menggambarkan bahwa pemanfaatan teknologi digital bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai lapisan dan dimensi organisasi publik, tujuan efisiensi dan peningkatan kualitas layanan dapat dicapai dengan lebih baik. Namun, perubahan ini juga menuntut pergeseran dalam budaya organisasi, di mana penerapan

teknologi tidak hanya menjadi tanggung jawab departemen teknologi informasi, tetapi menjadi perhatian semua bagian dalam organisasi.

Selain itu, teori transformasi digital menunjukkan bahwa proses ini memerlukan penyesuaian dalam cara kerja dan proses organisasi secara keseluruhan. Ini mencakup pembaruan prosedur-prosedur kerja, pembentukan tim yang lebih terkoordinasi, dan pengembangan kompetensi digital di seluruh jajaran organisasi. Transformasi digital juga mendorong perubahan pola pikir, dengan mengajukan pandangan bahwa teknologi bukanlah hambatan, tetapi alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Dalam kerangka penelitian teori transformasi digital menjadi penting karena menghubungkan antara upaya perubahan teknologi dan tujuan mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dengan memahami konsep ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi bagaimana transformasi digital dalam organisasi publik tidak hanya memengaruhi cara organisasi berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga bagaimana dampaknya pada budaya organisasi, tata kelola, dan pola pikir yang akhirnya berkontribusi pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi dan lebih inklusif ([Zakharova, 2022](#)).

Dalam penelitian ini, teori-teori ini digunakan untuk merangkul pemahaman tentang bagaimana transformasi digital dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam organisasi publik. Konsep "Teori Teknologi dan Determinisme Sosial" membantu kita memahami bagaimana teknologi digital, sebagai aspek sentral dari transformasi digital, tidak hanya berperan sebagai alat, tetapi juga membentuk budaya, norma, dan interaksi di masyarakat ([Braga Tadeu et al., 2019](#); [Galindo-Martín et al., 2019](#); [Lin et al., 2022](#); [Liu et al., 2011](#); [Pham et al., 2020](#)). Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya memfasilitasi partisipasi, tetapi juga membentuk kerangka nilai dan norma yang mengatur interaksi dalam ekosistem digital. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana norma-norma ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, "Teori Partisipasi Publik" memberikan landasan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks transformasi digital. Teori ini mengakui bahwa partisipasi masyarakat bukanlah konsep yang sederhana dan dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti motivasi individu, akses ke informasi, dan tata kelola partisipatif. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor. Menurut [Foster et al., \(2019\)](#), partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai proses di mana individu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Penelitian oleh [Harrison & Sayogo \(2014\)](#) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan lokal dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan hasil yang dicapai. Namun, [Ye et al.,\(2022\)](#) mengidentifikasi bahwa tantangan dalam partisipasi masyarakat sering berkaitan dengan kurangnya sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif. Oleh karena itu, strategi seperti pendidikan masyarakat dan pemberdayaan ([Clark et al., 2019](#)), serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ([Morgan, 2016](#)) dapat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat yang efektif memerlukan pendekatan yang berpusat pada masyarakat dan mempertimbangkan konteks lokal ([George et al., 2015](#); [Schäfer & Debus, 2018](#)).

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berkaitan erat dengan konsep demokrasi dan *governance*. Seperti yang dijelaskan oleh Favero et al.,(2016), partisipasi masyarakat yang kuat dapat memperkuat norma-norma kepercayaan dan kerjasama yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Dalam konteks *governance*, (1973) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya bersama, yang dapat mengarah pada solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Namun, partisipasi masyarakat bukan tanpa tantangan. [Van Holm \(2019\)](#) menunjukkan bahwa tanpa struktur dan mekanisme yang tepat, partisipasi masyarakat dapat dikooptasi oleh kelompok-kelompok yang berkepentingan, mengurangi efektivitasnya. Untuk mengatasi hal ini, [Lee, \(2008\)](#) menyarankan pendekatan yang lebih inklusif dan *bottom-up* dalam merancang dan melaksanakan program partisipasi masyarakat.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat diakui sebagai komponen kunci. Menurut [Kumar \(2002\)](#), pendekatan partisipatif yang mendorong keterlibatan langsung masyarakat lokal dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan relevansi dan akseptabilitas solusi yang dihasilkan. Hal ini juga ditegaskan oleh [Jackson & Shade \(1973\)](#), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas dan keberlanjutan proyek pembangunan, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, [Lee \(2008\)](#) mengkritik bahwa sering kali partisipasi masyarakat hanya dianggap sebagai alat dan bukan sebagai tujuan dalam proses pembangunan, yang mengarah pada partisipasi simbolis tanpa dampak nyata. Kajian oleh [Hickey & Mohan \(2014\)](#) menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kritis dan reflektif dalam memahami dinamika kekuasaan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Lebih lanjut, konsep "Efek Jaringan" juga akan diintegrasikan dalam analisis. Dalam dunia digital yang terhubung erat,

efek jaringan memainkan peran penting dalam memperluas dampak partisipasi. Dengan teknologi digital, pesan dan gagasan dapat menyebar dengan cepat melalui jejaring sosial dan platform *online*. Penelitian ini akan menggali bagaimana efek jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam konteks transformasi digital.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memberikan kedalaman pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat, serta memungkinkan peneliti untuk menjelajahi berbagai dimensi dan konteks yang mempengaruhi fenomena ini ([Creswell & Creswell, 2017](#)). Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari beragam pihak yang terlibat dalam proses partisipatif dan transformasi digital di organisasi publik. Ini mencakup perwakilan dari pemerintah, petugas publik seperti: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Selanjutnya, masyarakat yang menerima layanan pada organisasi tersebut, dalam inisiatif-partisipatif terkait transformasi digital. Pemilihan informan didasarkan pada tujuan mendapatkan wawasan yang beragam dan mendalam tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi partisipasi masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan pandangan mendalam dan perspektif informan tentang bagaimana transformasi digital telah mempengaruhi partisipasi mereka dalam konteks keterlibatan publik. Observasi partisipatif digunakan untuk mengamati secara langsung interaksi antara informan dengan teknologi digital dan lingkungan partisipatif yang terbentuk. Data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen terkait inisiatif transformasi digital dan partisipasi masyarakat.

Prosedur wawancara dalam penelitian ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan pandangan mendalam dan perspektif informan tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi partisipasi mereka dalam konteks keterlibatan publik. Pertama, peneliti akan merancang pedoman wawancara yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terbuka terkait pengalaman dan pandangan partisipan terhadap transformasi digital. Wawancara akan dijadwalkan dengan perwakilan dari pemerintah, petugas publik, dan masyarakat yang menerima layanan pada organisasi terkait. Peneliti akan melakukan wawancara secara tatap muka atau melalui platform digital, mencatat semua tanggapan

secara rinci dan, jika memungkinkan, merekam percakapan untuk keperluan transkripsi dan analisis lebih lanjut.

Kriteria seleksi partisipan didasarkan pada tujuan memperoleh wawasan yang beragam dan mendalam mengenai dampak transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat. Partisipan dipilih dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses partisipatif dan transformasi digital di organisasi publik, termasuk perwakilan pemerintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, dan Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Selain itu, masyarakat yang menerima layanan dalam inisiatif partisipatif terkait transformasi digital juga akan dipilih. Seleksi partisipan dilakukan secara *purposive*, memastikan bahwa setiap partisipan memiliki keterlibatan langsung atau pengalaman relevan dengan topik penelitian. Metode observasi partisipatif akan digunakan untuk mengamati secara langsung interaksi antara informan dengan teknologi digital dan lingkungan partisipatif yang terbentuk. Peneliti akan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari yang melibatkan penggunaan teknologi digital di organisasi publik dan interaksi antara petugas publik dan masyarakat. Catatan lapangan yang rinci akan dibuat selama observasi ini, mencatat perilaku, percakapan, dan interaksi yang terjadi dalam konteks penggunaan teknologi digital.

Data kualitatif yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Langkah pertama melibatkan transkripsi wawancara dan pembuatan catatan lapangan yang rinci. Data kemudian diuraikan dan diklasifikasikan menjadi tema-tema yang muncul berkaitan dengan transformasi digital dan partisipasi masyarakat. Proses ini melibatkan pencarian pola-pola, konsep, dan hubungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan ([Dekker et al., 2020](#)). Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, diharapkan penelitian ini dapat menggali wawasan yang dalam tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di organisasi sektor publik.

Hasil dari penelitian kualitatif ini akan memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual tentang dinamika transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam sektor publik. Ini akan membantu dalam menggambarkan pola-pola kompleks, hambatan, dan peluang yang mungkin muncul, serta memberikan dasar bagi perbaikan strategis dan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi aktif dan inklusif dalam era digital. Teknis analisis data penelitian ini akan melibatkan beberapa langkah metodologis yang cermat

untuk mewujudkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik yang lebih aktif. Pertama, data informan yang diperoleh dari partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan publik yang berhubungan dengan transformasi digital.

Selanjutnya, data sekunder akan dikumpulkan, termasuk data dari platform digital yang relevan, arsip media sosial, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital. Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam diskusi *online*, serta respons dari pemerintah dan lembaga lainnya terhadap partisipasi masyarakat dalam isu-isu digital. Selain itu, analisis isi kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data kualitatif, seperti tanggapan terhadap pertanyaan terbuka dalam hasil wawancara dan konten media sosial. Pendekatan ini akan membantu dalam memahami lebih dalam persepsi, motif, dan pandangan masyarakat terkait dengan keterlibatan mereka dalam isu-isu digital.

Selama proses analisis data, penelitian ini juga akan berfokus pada identifikasi temuan tematis dan pola yang muncul, serta perbandingan antara temuan kualitatif dan hasil analisis statistik. Langkah-langkah spesifik dalam analisis tematik dan konten melibatkan beberapa tahapan metodologis yang cermat. Pertama, wawancara akan ditranskripsi secara verbatim, dan catatan lapangan dari observasi partisipatif akan disusun dengan rinci. Data yang terkumpul kemudian diuraikan dan diklasifikasikan menjadi tema-tema yang muncul berkaitan dengan transformasi digital dan partisipasi masyarakat. Analisis tematik dimulai dengan membaca ulang transkripsi dan catatan lapangan untuk familiarisasi dengan data. Peneliti akan mengidentifikasi kode-kode awal yang relevan dan menyusun tema-tema utama yang mencerminkan pola-pola, konsep, dan hubungan yang muncul dari data.

Analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pola dalam diskusi *online* serta respons dari pemerintah dan lembaga lainnya terhadap partisipasi masyarakat dalam isu-isu digital. Data sekunder dari platform digital, arsip media sosial, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan transformasi digital akan dikumpulkan dan dianalisis. Pendekatan analisis isi kualitatif akan digunakan untuk menganalisis tanggapan terhadap pertanyaan terbuka dalam hasil wawancara dan konten media sosial, membantu dalam memahami persepsi, motif, dan pandangan masyarakat terkait keterlibatan mereka dalam isu-isu digital. Selama proses analisis data, peneliti akan fokus pada identifikasi temuan tematis dan pola yang muncul, serta melakukan perbandingan antara temuan kualitatif dan

hasil analisis statistik untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara transformasi digital dan partisipasi masyarakat.

HASIL DAN DISKUSI

Transformasi digital tidak hanya sekadar menghadirkan perubahan teknologi, tetapi juga telah memutarbalikkan dinamika tradisional antara pemerintah dan masyarakat, membuka jalan bagi keterlibatan masyarakat yang lebih proaktif dan luas dalam proses pembuatan keputusan serta pengembangan kebijakan. Perubahan ini juga menggambarkan bagaimana transformasi digital mematahkan batas geografis dan waktu, membuka pintu bagi partisipasi yang lebih inklusif dari berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan mudahnya hambatan komunikasi tradisional, teknologi digital telah memungkinkan suara warga dari berbagai sudut Indonesia untuk didengar, membentuk corak partisipasi yang lebih demokratis dan merata. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara inisial DKII yang menyatakan bahwa:

“Teknologi yang digunakan dalam pemberian pelayanan publik seperti pengurusan izin telah menggunakan aplikasi android dan website. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat dalam melakukan pengurusan berbagai izin yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, mampu mengetahui lebih luas tentang informasi yang disampaikan pemberi layanan kepada masyarakat.”

Melalui penetrasi teknologi digital yang semakin meluas, tercipta akses universal yang memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa terbatas oleh jarak geografis atau batasan waktu. Masyarakat dari berbagai sudut wilayah Indonesia dapat berkomunikasi, berinteraksi, dan berpartisipasi dalam dialog dan kegiatan partisipatif, merajut keragaman suara dan pandangan yang kaya menjadi satu kesatuan dalam proses pembuatan keputusan publik.

Momentum ini juga mencerminkan bagaimana transformasi digital telah menghancurkan hambatan komunikasi yang dahulu sulit diatasi. Keterbatasan dalam komunikasi konvensional seperti jarak dan infrastruktur tidak lagi menjadi penghalang utama. Melalui platform digital, pesan dan informasi dapat tersebar dengan cepat dan merata, menciptakan panggung yang setara bagi partisipasi semua elemen masyarakat. Dengan kata lain, transformasi digital telah membuka lembaran baru dalam mengubah partisipasi masyarakat dari yang sebelumnya terbatas menjadi lebih demokratis, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pihak pemberi layanan yang mengungkapkan bahwa:

“Keterbatasan komunikasi dan platform digital yang disediakan memiliki kelemahan terutama dalam informasi dan sosialisasi dan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang tersedia”

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan penerima layanan yaitu masyarakat yang mengungkapkan bahwa:

“Pelayanan pemerintah telah berupaya untuk menyajikan informasi digital akan tetapi masih terdapat keterbatasan akses informasi yang jauh, jaringan yang masih bermasalah dan letak geografis yang susah terjangkau”

Sementara terobosan ini membawa dampak positif, perlu diakui pula bahwa terdapat tantangan dalam memastikan bahwa akses teknologi dan peluang partisipasi merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya memaksimalkan potensi transformasi digital, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merancang kebijakan yang memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal dalam revolusi partisipasi ini. Hasil penelitian ini mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Pertama, perlunya memastikan keamanan data dan privasi dalam kerangka transformasi digital yang semakin canggih. Kedua, perluasan partisipasi juga harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan inklusivitas, mengingat tidak semua warga memiliki akses serupa terhadap teknologi digital. Upaya untuk meminimalkan kesenjangan akses dan mengajak partisipasi semua lapisan masyarakat menjadi penting agar transformasi digital benar-benar merata.

Seiring dengan semakin intensifnya pertukaran informasi melalui platform digital, perlindungan terhadap data pribadi dan sensitif menjadi semakin penting. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan untuk mengumpulkan data, tetapi juga oleh upaya untuk memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan aman dan sesuai dengan standar etika yang ketat. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam merumuskan regulasi dan praktik terbaik yang menjaga keamanan serta privasi data. Perlu ada kerangka kerja hukum yang jelas dan berlaku untuk melindungi data pribadi warga. Lembaga-lembaga pengawas independen juga perlu didirikan atau diperkuat untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran privasi data.

Literasi digital menjadi faktor penting dalam mengatasi tantangan keamanan data. Masyarakat perlu diberi pendidikan tentang cara melindungi data pribadi mereka sendiri, mengenali potensi ancaman keamanan digital, dan mengadopsi praktik terbaik dalam penggunaan teknologi. Program-program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital harus diperluas, dan kampanye kesadaran publik tentang isu-isu privasi dan

keamanan data perlu ditingkatkan. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital yang masih ada di beberapa wilayah dan kelompok masyarakat. Bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki akses yang memadai ke teknologi digital, tantangan ini dapat membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam transformasi digital. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan inklusi digital dan mengurangi kesenjangan akses harus menjadi prioritas dalam agenda transformasi digital.

Kedua, meskipun transformasi digital telah membawa dampak inklusif bagi partisipasi masyarakat, masih terdapat ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital di berbagai segmen masyarakat. Tantangan ini memerlukan upaya bersama untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar merata dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Upaya untuk mengatasi kesenjangan akses ini membutuhkan langkah-langkah konkret. Pertama, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk menyediakan akses internet yang terjangkau kepada seluruh masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Ini melibatkan perluasan infrastruktur internet, subsidi biaya akses, dan pengembangan program akses internet gratis atau murah bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Selanjutnya, pendidikan digital juga merupakan komponen kunci dalam mengatasi ketidaksetaraan akses. Program pelatihan digital perlu diperluas, terutama di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pelatihan, untuk memastikan bahwa semua individu memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekosistem digital. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, literasi digital, dan kesadaran akan risiko serta etika dalam dunia digital. Selain itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi hambatan ekonomi atau geografis yang dapat menghalangi partisipasi. Hal ini termasuk pemberian insentif bagi penyedia layanan digital untuk menjangkau daerah-daerah yang kurang terlayani secara ekonomis, dan pengembangan solusi inovatif untuk mengatasi kendala geografis, seperti penggunaan teknologi satelit atau jaringan nirkabel berbasis komunitas.

Semua hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip inklusi, kesetaraan, dan keadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses transformasi digital dan keterlibatan publik yang lebih aktif. Dengan demikian, kita dapat mencapai masyarakat yang lebih terlibat, berpengetahuan, dan memiliki dampak positif dalam dunia digital yang terus berkembang. Melalui upaya bersama dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, transformasi digital dapat diarahkan untuk

menciptakan dampak yang lebih positif dan inklusif bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengutamakan keamanan data dan privasi serta memastikan partisipasi yang merata adalah langkah penting dalam memastikan bahwa manfaat transformasi digital tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, tetapi oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini membuka cakrawala baru dalam memahami dampak transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di Indonesia. Transformasi digital telah memainkan peran krusial dalam mengubah paradigma partisipasi publik, menjadikan masyarakat lebih aktif dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta pengembangan kebijakan. Platform-platform digital seperti media sosial, situs web pemerintah, dan aplikasi mobile telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan lembaga-lembaga publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknologi digital telah menjadi alat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam ranah keterlibatan publik ([AlNuaimi et al., 2022](#); [Mai et al., 2023](#); [Syväjärvi et al., 2019](#)). Dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data masyarakat, perlu ada kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa data tersebut diolah dengan aman dan tidak melanggar privasi individu. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses terhadap teknologi digital di masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat mungkin belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari transformasi digital ini, sehingga diperlukan upaya nyata untuk memastikan partisipasi yang merata di semua lapisan masyarakat ([Dörner & Rundel, 2021](#); [Sartal et al., 2020](#)).

Dalam konteks penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam mendiskusikan peran transformasi digital dalam membentuk dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik. Temuan-temuan ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana teknologi digital dapat memajukan partisipasi masyarakat dan bagaimana tantangan yang muncul dapat diatasi untuk mewujudkan partisipasi yang lebih inklusif dan demokratis di Indonesia.

Hasil penelitian ini memiliki sejumlah implikasi penting yang dapat membentuk arah kebijakan dan praktik dalam konteks transformasi digital dan partisipasi masyarakat dalam keterlibatan publik di Indonesia. Pertama, temuan bahwa transformasi digital telah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat menunjukkan perlunya penguatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk membangun interaksi yang lebih efektif dan inklusif. Dalam konteks ini, upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi inisiatif transformasi digital dapat

memperkuat dampak positif yang dihasilkan ([Alnuaimi et al., 2022](#); [Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2015](#)). Kedua, kesadaran akan tantangan keamanan data dan privasi yang muncul menekankan perlunya pengembangan regulasi yang kuat dan sistem pengelolaan data yang etis. Melalui kerjasama antara sektor publik dan swasta, perlindungan data pribadi masyarakat dapat dijamin sehingga rasa percaya masyarakat terhadap penggunaan teknologi digital dapat dipertahankan ([Gupta et al., 2019](#); [Waruwu et al., 2020](#)).

Selanjutnya, temuan mengenai ketidaksetaraan akses terhadap teknologi digital menggarisbawahi perlunya tindakan konkret untuk memastikan partisipasi yang merata. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah seperti penyediaan akses internet yang terjangkau di seluruh wilayah dan pelatihan digital bagi kelompok yang kurang terampil secara teknologi. Tindakan ini akan memastikan bahwa transformasi digital berkontribusi pada inklusivitas dan keadilan dalam partisipasi masyarakat ([Alnuaimi et al., 2022](#); [Gaglio et al., 2022](#)).

Transformasi digital telah membuka pintu bagi partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam banyak aspek kehidupan mereka. Salah satu implikasi penting adalah pergeseran dari model komunikasi satu arah menjadi interaksi dua arah antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat. Ini berarti bahwa masyarakat sekarang dapat memberikan masukan, memberikan umpan balik langsung, dan bahkan berkolaborasi dalam proses pembuatan keputusan. Selain itu, data yang dihasilkan oleh teknologi digital memungkinkan penelitian lebih lanjut tentang perilaku masyarakat dan preferensi mereka. Penelitian lanjutan dapat memfokuskan pada analisis data besar untuk mengidentifikasi tren partisipasi dan pola keterlibatan masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk memotivasi dan melibatkan lebih banyak orang dalam proses-proses kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dapat memperluas aksesibilitas dan keterlibatan publik, khususnya bagi kelompok yang mungkin kurang terwakili dalam diskusi publik. Dengan demikian, penelitian lanjutan akan menjadi kunci untuk memahami potensi penuh transformasi digital dalam mewujudkan keterlibatan publik yang lebih aktif dan inklusif di era digital ini.

PENUTUP

Transformasi digital telah membawa dampak yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam konteks keterlibatan publik di Indonesia. Transformasi ini telah

mengubah paradigma partisipasi dari yang sebelumnya bersifat pasif menjadi lebih aktif, inklusif, dan merata. Melalui platform-platform digital, masyarakat memiliki akses yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknologi digital memiliki potensi untuk mengubah lanskap partisipasi masyarakat.

Dalam menghadapi potensi positif tersebut, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Keamanan data dan privasi menjadi isu yang penting dalam konteks transformasi digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kebijakan dan regulasi yang dapat melindungi data pribadi masyarakat serta memastikan penggunaan teknologi digital yang etis. Selain itu, perlu juga diakui bahwa akses teknologi digital belum merata di semua lapisan masyarakat. Tantangan ini menekankan pentingnya upaya untuk meminimalkan kesenjangan akses, sehingga transformasi digital dapat benar-benar mengakomodasi partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah perlu mengambil peran proaktif dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara dalam berpartisipasi.

Sebagai saran untuk masa depan, kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola transformasi digital ini. Keberhasilan transformasi digital dalam mengaktifkan partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif memerlukan kerjasama yang kuat dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan manfaat teknologi digital. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggali aspek-aspek lain dari dampak transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat, serta menganalisis efektivitas langkah-langkah kebijakan yang diambil untuk mengatasi tantangan yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Alcaide Muñoz, L., Rodríguez Bolívar, M. P., & López Hernández, A. M. (2017). [Transparency in Governments: A Meta-Analytic Review of Incentives for Digital Versus Hard-Copy Public Financial Disclosures](#). *American Review of Public Administration*, 47(5), 550–573. <https://doi.org/10.1177/0275074016629008>
- Alnuaimi, B. K., Kumar, S., Ren, S., & Budhwar, P. (2022). [Mastering digital transformation : The nexus between leadership , agility , and digital strategy](#). *Journal of Business Research*, 145(March), 636–648. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.038> (2)
- Amirkhanyan, A. A., Cheon, O., Davis, J. A., Meier, K. J., & Wang, F. (2019). [Citizen Participation and Its Impact on Performance in U.S. Nursing Homes](#). *American Review of Public Administration*, 49(7), 840–854. <https://doi.org/10.1177/0275074019854172>
- Anthopoulos, L., Sirakoulis, K., & Reddick, C. G. (2021). [Conceptualizing Smart Government: Interrelations and Reciprocities with Smart City](#). *Digital Government: Research and Practice*, 2(4), 1–28. <https://doi.org/10.1145/3465061>
- Arbabi, F., Khansari, S. M., Salamzadeh, A., Gholampour, A., Ebrahimi, P., & Fekete-Farkas, M. (2022). [Social Networks Marketing, Value Co-Creation, and Consumer Purchase Behavior: Combining PLS-SEM and NCA](#). *Journal of Risk and Financial Management*, 15(10), 440. <https://doi.org/10.3390/jrfm15100440>
- Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2015). [Knowledge Management: Systems and Processes](#). In *Knowledge Management: Systems and Processes (Second)*. Routledge.
- Braga Tadeu, H. F., de Castro Moura Duarte, A. L., Taurion, C., & Jamil, G. L. (2019). [Digital transformation: Digital maturity applied to study Brazilian perspective for industry 4.0](#). *Best Practices in Manufacturing Processes: Experiences from Latin America*, 3–27.
- Busulwa, R., Pickering, M., & Mao, I. (2022). [Digital transformation and hospitality management competencies: Toward an integrative framework](#). *International Journal of Hospitality Management*, 102(October 2021), 103132. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103132>
- Clark, D. A., Biggeri, M., & Frediani, A. A. (2019). [The capability approach, empowerment and participation: concepts, methods and applications](#). Springer.
- Cohen, A. B., Stump, L., Krumholz, H. M., Cartiera, M., Jain, S., Scott Sussman, L., Hsiao, A., Lindop, W., Ying, A. K., Kaul, R. L., Balczak, T. J., Tereffe, W., Comerford, M., Jacoby, D., & Navai, N. (2022). [Aligning mission to digital health strategy in academic medical centers](#). *Npj Digital Medicine*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.1038/s41746-022-00608-7>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). [Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches](#). Sage publications.
- Dekker, R., Franco Contreras, J., & Meijer, A. (2020). [The Living Lab as a Methodology for Public Administration Research: a Systematic Literature Review of its Applications in the Social Sciences](#). *International Journal of Public Administration*, 43(14), 1207–1217. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1668410>

- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). [The new public service: Serving rather than steering](https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117). *Public Administration Review*, 60(6), 549–559. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00117>
- Dörner, O., & Rundel, S. (2021). [Organizational Learning and Digital Transformation: A Theoretical Framework](https://doi.org/10.1007/978-3-030-55878-9_4). *Digital Transformation of Learning Organizations*, 61–75. https://doi.org/10.1007/978-3-030-55878-9_4
- Ebenso, B., Okusanya, B., Okunade, K., Akeju, D., Ajepe, A., Akaba, G. O., Yalma, R. M., Dirisu, O., Tukur, J., Abdullahi, M. K., Okuzu, O., & Allsop, M. J. (2021). [What Are the Contextual Enablers and Impacts of Using Digital Technology to Extend Maternal and Child Health Services to Rural Areas? Findings of a Qualitative Study From Nigeria](https://doi.org/10.3389/fgwh.2021.670494). *Frontiers in Global Women's Health*, 2, 670494. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2021.670494>
- Elia, G., Margherita, A., & Passiante, G. (2020). [Digital entrepreneurship ecosystem: How digital technologies and collective intelligence are reshaping the entrepreneurial process](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119791). *Technological Forecasting and Social Change*, 150(September 2019), 119791. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119791>
- Emina, K. A. (2020). [Public Administration and Ethics in Digital Era](#). *PINISI Discretion Review*, 1(1), 243–260.
- Favero, N., Meier, K. J., & O'Toole, L. J. (2016). [Goals, Trust, Participation, and Feedback: Linking Internal Management with Performance Outcomes](https://doi.org/10.1093/jopart/muu044). *Journal of Public Administration Research and Theory*, 26(2), 327–343. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu044>
- Ficaj, M. Y., & Tanner, J. A. (2014). The Participation Decision Study: Private School Leaders' Perspectives on Accessing Federal Funding Considering Environmental Factors Influencing NCLB Choice and Competition Mechanisms. *SAGE Open*, 4(1), 2158244014523023.
- Foster, N., Ison, R., Blackmore, C., & Collins, K. (2019). [Revisiting deliberative policy analysis through systemic co-inquiry: some experiences from the implementation of the Water Framework Directive in England](https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1618816). *Policy Studies*, 40(5), 510–533. <https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1618816>
- Gaglio, C., Kraemer-Mbula, E., & Lorenz, E. (2022). [The effects of digital transformation on innovation and productivity: Firm-level evidence of South African manufacturing micro and small enterprises](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121785). *Technological Forecasting and Social Change*, 182(May), 121785. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121785>
- Galindo-Martín, M. Á., Castaño-Martínez, M. S., & Méndez-Picazo, M. T. (2019). [Digital transformation, digital dividends and entrepreneurship: A quantitative analysis](https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.014). *Journal of Business Research*, 101(December 2018), 522–527. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.12.014>
- Gan, B., Menkhoff, T., & Smith, R. (2015). Enhancing students' learning process through interactive digital media: New opportunities for collaborative learning. *Computers in Human Behavior*, 51, 652–663. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.12.048>
- Gascó-Hernández, M., Martin, E. G., Reggi, L., Pyo, S., & Luna-Reyes, L. F. (2018).

- [Promoting the use of open government data](https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.003): Cases of training and engagement. *Government Information Quarterly*, 35(2), 233–242. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.01.003>
- George, A. S., Mehra, V., Scott, K., & Sriram, V. (2015). [Community participation in health systems research: A systematic review assessing the state of research, the nature of interventions involved and the features of engagement with communities](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141091). *PLoS ONE*, 10(10), 1–25. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0141091>
- Goldsack, J. C., & Zanetti, C. A. (2021). [Defining and Developing the Workforce Needed for Success in the Digital Era of Medicine](https://doi.org/10.1159/000512382). *Digital Biomarkers*, 4(Suppl 1), 136–142. <https://doi.org/10.1159/000512382>
- Gupta, R., Mejia, C., & Kajikawa, Y. (2019). [Business, innovation and digital ecosystems landscape survey and knowledge cross sharing](https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.004). *Technological Forecasting and Social Change*, 147(July), 100–109. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.004>
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). [Transparency, participation, and accountability practices in open government](https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.03.001): A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525.
- He, Z., Huang, H., Choi, H., & Bilgihan, A. (2022). [Building organizational resilience with digital transformation](https://doi.org/10.1108/JOSM-06-2021-0216). *Journal of Service Management*, December. <https://doi.org/10.1108/JOSM-06-2021-0216>
- Hickey, S., & Mohan, G. (2004). [Participation--from tyranny to transformation?: Exploring new approaches to participation in development](https://doi.org/10.1016/j.socdev.2004.03.001). Zed books.
- Jackson, J. S., & Shade, W. L. (1973). [Citizen participation, democratic representation, and survey research](https://doi.org/10.1016/j.uraq.1973.03.001). *Urban Affairs Quarterly*, 9(1), 57–89.
- Jeannot, G. (2018). [From e-government to the smart city: old and new issues](https://doi.org/10.1016/j.eurpub.2018.03.001). *Colloque European Group of Public Administration ...*
- Jewell, C., & Bero, L. (2007). [Public participation and claimsmaking: Evidence utilization and divergent policy frames in California's ergonomics rulemaking](https://doi.org/10.1093/jopart/mul023). *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17(4), 625–650. <https://doi.org/10.1093/jopart/mul023>
- Jiang, D., Chen, Z., Liu, T., Zhu, H., Wang, S., & Chen, Q. (2022). [Individual Creativity in Digital Transformation Enterprises: Knowledge and Ability, Which Is More Important?](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.734941) *Frontiers in Psychology*, 12, 734941. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.734941>
- Jun, K.-N., & Bryer, T. (2017). [Facilitating Public Participation in Local Governments in Hard Times](https://doi.org/10.1177/0275074016643587). *American Review of Public Administration*, 47(7), 840–856. <https://doi.org/10.1177/0275074016643587>
- Kernaghan, K. (2014). [Digital dilemmas: Values, ethics and information technology](https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.03.001). *Canadian Public Administration*, 57(2), 295–317.
- Krøtel, S. M. L. (2021). [Digital Communication of Public Service Information and its Effect on Citizens' Perception of Received Information](https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672182). *International Journal of Public Administration*, 44(2), 132–145. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1672182>
- Kumar, S. (2002). [Methods for community participation: a complete guide for practitioners](https://doi.org/10.1016/j.socdev.2002.03.001).
- Lattouf, O. M. (2022). [Impact of digital transformation on the future of medical education and practice](https://doi.org/10.1016/j.jcs.2022.03.001). *Journal of Cardiac Surgery*, 37(9), 2799–2808.

- <https://doi.org/10.1111/jocs.16642>
- Lee, S. Y. (2008). [Drivers for the participation of small and medium-sized suppliers in green supply chain initiatives](#). *Supply Chain Management*, 13(3), 185–198. <https://doi.org/10.1108/13598540810871235>
- Lim, S. B., & Yigitcanlar, T. (2022). [Participatory Governance of Smart Cities: Insights from e-Participation of Putrajaya and Petaling Jaya, Malaysia](#). In *Smart Cities* (Vol. 5, Issue 1, pp. 71–89). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/smartcities5010005>
- Limani, Y., Stapleton, L., & Groumpos, P. P. (2018). [The Challenges of Digital Transformation in Post-Conflict Transition Regions: Digital Technology Adoption in Kosovo](#). *IFAC-PapersOnLine*, 51(30), 186–191. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.11.284>
- Lin, R., Yang, J., Jiang, F., & Li, J. (2022). [Does teacher's data literacy and digital teaching competence influence empowering students in the classroom?](#) Evidence from China. *Education and Information Technologies*, 1–23. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11274-3>
- Lindquist, E. A., & Huse, I. (2017). [Accountability and monitoring government in the digital era: Promise, realism and research for digital era governance](#). *Canadian Public Administration*, 60(4), 627–656.
- Liu, D., Chen, S., & Chou, T. (2011). [Resource fit in digital transformation: Lessons learned from the CBC Bank global e-banking project](#). *Management Decision*.
- Lorsuwannarat, T. (2017). [Public Participation in Budgeting: The New Path of Budget Reform in Thailand](#). *International Journal of Public Administration*, 40(5), 385–400. <https://doi.org/10.1080/01900692.2015.1126730>
- Mai, B. T., Nguyen, P. V., Ton, U. N. H., & Ahmed, Z. U. (2023). [Government policy, IT capabilities, digital transformation, and innovativeness in Post-Covid context: case of Vietnamese SMEs](#). *International Journal of Organizational Analysis*. <https://doi.org/10.1108/IJOA-11-2022-3480> (2)
- Marx, P., & Nguyen, C. G. (2018). [Political participation in European welfare states: does social investment matter?](#) *Journal of European Public Policy*, 25(6), 912–943. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1401109>
- Mecca, U., Moglia, G., Prizzon, F., & Rebaudengo, M. (2021). [Digital Twin for Maintenance Information Management](#). In *Advances in Civil and Industrial Engineering* (pp. 575–601). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-7091-3.ch025>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). [Defining digital transformation: Results from expert interviews](#). *Government Information Quarterly*. (2)
- Morgan, J. (2016). [Participation, empowerment and capacity building: Exploring young people's perspectives on the services provided to them by a grassroots NGO in sub-Saharan Africa](#). *Children and Youth Services Review*, 65, 175–182.
- Morrissey, J. (2000). [Indicators of citizen participation](#): lessons from learning teams in rural EZ/EC communities. *Community Development Journal*, 35(1), 59–74.
- Ohri-Vachaspati, P., Acciai, F., & DeWeese, R. S. (2021). [SNAP participation among low-income US households stays stagnant while food insecurity escalates in the months following the COVID-19 pandemic](#). *Preventive Medicine Reports*, 24, 101555.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101555>
- Osman, M. A., Mohd Noah, S. A., & Saad, S. (2022). [Ontology-Based Knowledge Management Tools for Knowledge Sharing in Organization-A Review](#). *IEEE Access*, 10, 43267–43283. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3163758>
- Pham, H. K., Thi, H. O., & Nguyen, T. (2020). [Professional Development with MOOCs-How an Organization Learns in the Age of Digital Transformation](#). 20–25.
- Prihanto, J. J. N., & Kurniasari, F. (2019). [Sustainable Digital Transformation in the Hospitality Industry: A Study of the Hotel Industry in Indonesia](#). *100(Icoi)*, 217–222. <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.38>
- Putra, I. K. M. (2022). [Digital Transformation and Agile Leadership: Bibliometrics Analysis and Future Avenue](#). *Journal of International Conference Proceedings*, 5(4), 96–110. <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i4.1926>
- Sartal, A., Carou, D., Davim, J. P., & Oztemel, E. (2020). [Understanding Digital Transformation. Enabling Technologies for the Successful Deployment of Industry 4.0](#), 1–30. <https://doi.org/10.1201/9780429055621-1>
- Schäfer, C., & Debus, M. (2018). [No participation without representation policy distances and abstention in european parliament elections](#). *Journal of European Public Policy*, 25(12), 1835–1854. <https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1363806> (2)
- Syvjärvi, A., Kivivirta, V., Stenvall, J., & Laitinen, I. (2019). [Digitalization and Information Management in Smart City Government](#). In *Smart Cities and Smart Spaces* (pp. 1428–1444). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-7030-1.ch064>
- Tassabehji, R., Hackney, R., & Popovič, A. (2016). [Emergent digital era governance: Enacting the role of the ‘institutional entrepreneur’ in transformational change. Government Information Quarterly](#), 33(2), 223–236. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.003>
- Van Holm, E. J. (2019). [Unequal Cities, Unequal Participation: The Effect of Income Inequality on Civic Engagement](#). *The American Review of Public Administration*, 49(2), 135–144. <https://doi.org/10.1177/0275074018791217>
- Waruwu, H., Asbari, M., Purwanto, A., Nugroho, Y. A., Fikri, M. A. A., Fauji, A., Shobihi, A. W. I., Hulu, P., Sudiyono, R. N., Agistiawati, E., & Dewi, W. R. (2020). [The Role of Transformational Leadership, Organizational Learning and Structure on Innovation Capacity: Evidence from Indonesian Private Schools](#). *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 378–397.
- Wirtz, B. W., Müller, W. M., & Weyerer, J. C. (2020). [Digital Pandemic Response Systems: A Strategic Management Framework Against Covid-19](#). *International Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1858316>
- Ye, Y., Pu, Y., & Xiong, A. (2022). [The impact of digital finance on household participation in risky financial markets: Evidence-based study from China](#). *PLoS ONE*, 17(4), e0265606. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265606>
- Young, M. M. (2020). [Implementation of digital era governance: The case of open data in US cities](#). *Public Administration Review*, 80(2), 305–315.
- Zakharova, S. A. (2022). [Public management of smart cities: European experience. In Digital Sociology](#) (Vol. 5, Issue 1, pp. 36–43). State University of Management.

<https://doi.org/10.26425/2658-347x-2022-5-1-36-43> (2)